

CITIZEN DEMOCRACY STUDIES: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Ataya Qonita Ananta^{1)*}, Salahudin²⁾, Muhammad Firdaus³⁾

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Malang-Indonesia

*Corresponding Author: nantaatayaa@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out how democratic citizens develop in the world. The research method applied to this research is a systematic review of literature using 140 scientific articles derived from scope databases. Reviewing articles using the Vosviewer application. The results reveal the concept of the dominance of citizen participation and democratic freedom. But in global democracy, many countries lack democratic principles, leading to erosion and autocracy. Democracy affects public policy through legislative branches, including representative democracy, which affects national security and social justice. In addition, it was found that per analysis of research data carried out from 2022 to 2023 related to the concept of civil democracy in some countries has an upward trend, as the volume of discussion on this topic continues to increase every year. Research results have contributed to the development of research on civil democracy in the world. The limitation of this research is that articles are only used from scope databases so the research findings cannot comprehensively describe issues of citizen democracy. Further research needs to use scientific articles derived from other leading international datasets, such as the Web of Science and Dimensions Scholars.

Keywords: State, Democracy, Policy, Freedom, Participation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan warga negara demokratis di dunia. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah review sistematis dari literatur menggunakan 140 artikel ilmiah yang berasal dari basis data skop. Meninjau artikel menggunakan aplikasi Vosviewer. Hasilnya mengungkapkan konsep dominasi partisipasi warga dan kebebasan demokratis. Tetapi dalam demokrasi global, banyak negara kekurangan prinsip-prinsip demokrasi, yang menyebabkan erosi dan autocracy. Demokrasi mempengaruhi kebijakan publik melalui cabang legislatif, termasuk demokrasi representatif, yang mempengaruhi keamanan nasional dan keadilan sosial. Selain itu, ditemukan bahwa per analisis data penelitian yang dilakukan dari 2022 hingga 2023 terkait dengan konsep demokrasi sipil di beberapa negara memiliki tren naik, karena volume diskusi tentang topik ini terus meningkat setiap tahunnya. Hasil penelitian telah berkontribusi pada pengembangan penelitian tentang demokrasi sipil di dunia. Pembatasan penelitian ini adalah bahwa artikel hanya digunakan dari basis data lingkup sehingga temuan penelitian tidak dapat secara komprehensif menggambarkan isu-isu demokrasi warga. Penelitian lebih lanjut perlu menggunakan artikel ilmiah yang berasal dari kumpulan data internasional terkemuka lainnya, seperti Web of Science dan Dimensions Scholars.

Kata Kunci: Negara, Demokrasi, Kebijakan, Kebebasan, Partisipasi

PENDAHULUAN

Dalam demokrasi sipil, rakyat memiliki hak dan tanggung jawab untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan. Keputusan yang digunakan untuk mempertahankan bangsa harus diputuskan atau dikendalikan oleh warga negara. Selain mempertahankan kedaulatan rakyat, demokrasi sipil didasarkan pada cita-cita seperti kesejahteraan, kebebasan, dan pertahanan hak individu (Iheanacho, 2022). Saat ini, sebagian besar negara menganut sistem demokrasi. Demokrasi berarti semua warga diberi hak yang sama dan status non-pemerintah, semua warga negara memiliki jumlah wilayah yang sama. Dasar legitimasi kekuasaan pemerintah adalah kekuatan rakyat (Lippert-Rasmussen, 2023). Partisipasi dalam politik juga didorong oleh demokrasi warga. Untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan negara, orang-orang didorong agar aktif berpartisipasi dalam politik. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan juga akan meningkatkan tanggung jawab setiap warga negara terhadap tugas yang diberikan (Liu et al., 2023).

Banyak penelitian sebelumnya menggambarkan demokrasi warga negara dengan berfokus pada berbagai topik dan isu. Beberapa ahli melihat masyarakat lebih tegas dalam membebani sistem politik atau menghancurkan pandangan kolektif tentang politik. Sisi lain melihat kebijakan kontroversial dalam memberi warga metode tambahan dan lebih efektif untuk mempengaruhi pembuat kebijakan (Lim & Yigitcanlar, 2022). Karagulyan & Batyreva, (2023) Mengungkapkan bahwa demokrasi perwakilan warga negara partai tidak berfungsi karena kelemahan struktural seperti ketidakmampuan representasi dalam kelompok, asimetri informasi, pengambilalihan negara oleh partai politik dan polisentrisme administratif yang tidak terkoordinasi. Studi lain yang dilakukan oleh Qin, (2023) bahwa demokrasi lokal memang telah menciptakan ruang bagi warga dan gerakan sosial untuk menyampaikan keluhan mereka. Namun, hasilnya bervariasi, sebagian karena hubungan kekuasaan dalam pemerintahan lokal, karakteristik dan strategi yang dipilih oleh gerakan sosial.

Meskipun penelitian sebelumnya telah menjelaskan banyak tentang demokrasi warga, tetapi tidak menggunakan banyak pendekatan review sastra sistematis dengan artikel yang berasal dari database scopus dan tidak banyak menggunakan metode review artikel dengan aplikasi Vosviewer. Oleh karena itu, studi ini berfokus pada kertas ulasan dengan pendekatan SLR menggunakan 144 artikel ilmiah dan berasal dari database yang luas. Metode SLR adalah metode ilmiah yang memiliki kekuatan dan keuntungan dalam memahami masalah penelitian berdasarkan penelitian sebelumnya.

Fokus penelitian ini mengarah pada upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu, "Bagaimana perkembangan penelitian tentang demokrasi warga negara di dunia". Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konten kualitatif dengan pendekatan SLR dan analisis artikel menggunakan Vosviewer. Pernyataan ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan demokrasi warga negara, dan pengembangan kebijakan pemerintah dalam demokrasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebutuhan demokrasi global dalam delapan tahun terakhir telah memungkinkan transformasi sosial seluruh negara-negara di dunia. Kebutuhan ini timbul dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) serta transformasi partai politik, yaitu dari kebocoran keluhan pribadi di luar struktur organisasi formal, mobilisasi nasional dan lokal, dan promosi bentuk komunikasi lebih langsung dan tidak langsung yang sering difasilitasi oleh media sosial (Dumitru et al., 2023). GSoD menunjukkan bahwa sebagian besar negara-negara besar tidak memiliki prinsip-prinsip demokrasi yang terkait dengan kedaulatan nasional. Penurunan ini terlibat dalam berbagai konteks, seperti erosi, regresi, dan autocracy yang mendalam. Hal ini memiliki implikasi penting untuk kesehatan dan kemajuan demokrasi media yang bahagia adalah penciptaan dan pemeliharaan demokrasi sehat dan protektif, mirip dengan demokrasi melemah (Stratu-Strelet et al., 2023). Bagi negara-negara yang mengalami regresi demokratis signifikan sebagai produk sampingan transisi, pemantauan prosedur pemilihan dan penguatan sistem berfungsi sebagai jaminan untuk memastikan kesuksesan proses yang disebutkan di atas (Zimbalist, 2022). Selain itu, media sosial memfasilitasi komunikasi di dalam komunitas. Kegagalan informasi dan kesalahpahaman juga dapat menimbulkan keraguan isu-isu yang belum terpecahkan sebelumnya, sehingga dapat berkontribusi lebih lanjut terhadap erosi kepercayaan dalam proses pemilihan. Panduan yang lebih ketat ketika datang ke platform media sosial semakin dibutuhkan (Kud, 2023).

Erosionisme demokrasi terjadi dalam berbagai situasi dan konteks. Demokrasi selalu dikritik dan tidak mungkin berhasil dalam konteks akademis dan kebijakan, namun, sayangnya analisis empiris dan metodologis dari isi artikel ini dalam konteks praktis bagi warga negara masih dangkal (Gouache, 2022). Membangun dan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi di tengah keterbatasan sumber daya, pemerintahan dan representasi politik di hadapan tantangan. Demokrasi di setiap negara adalah sarana untuk memastikan bahwa pembangunan sosial dan ekonomi berjalan lancar dan berkelanjutan (Frimpong et al., 2022). Salah satu aspek demokrasi secara luas dikritik dengan produktivitas tenaga kerja tinggi terkait dengan kesenjangan antara ukuran sektor dan

tenaga kerja. Pembatasan ruang sipil, penurunan kebebasan sipil, pembatasan pada masyarakat sipil dan kebebasannya dapat dirusak oleh demokrasi lama (Krawatzek & Langbein, 2022). Singapura adalah studi kasus yang sangat informatif untuk perbandingan politik. Negara ini memiliki semua kondisi yang menguntungkan, menurut teori dasar modernisasi, hal ini dapat menghalangi kemajuan demokrasi, tetapi itu bukan negara demokratis. Secara konseptual, persepsi demokrasi oleh orang-orang Singapura sangat mirip dengan apa yang umumnya digambarkan sebagai demokrasi pemilih di dunia maju. Namun, ketika mengevaluasi kinerja lembaga pemerintah atau, pandangan liberal tentang keadilan dan ketidakadilan bertabrakan dengan pendekatan lebih pragmatis yang melampaui prinsip-prinsip keberhasilan dan kesejahteraan dan berfokus pada masyarakat umum dan pekerjaan, yang tidak mengalahkan aspek bisnis lainnya seperti efisiensi (Osterberg-Kaufmann & Teo, 2022).

Warga negara demokratis memiliki keuntungan signifikan dalam menjamin pemerintahan yang baik. Demokrasi memberi warga negara hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan politik dan pemerintah. Kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam demokrasi, ketika kekuasaan terhubung di tangan rakyat (Pungas, 2023). Dalam sistem demokrasi, pemerintah harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada rakyat. Ini memungkinkan warga negara untuk memantau tindakan pemerintah dan memastikan akuntabilitas pers yang beragam dan akses informasi yang lebih terbuka (Dalton, 2022). Demokrasi melindungi hak-hak rakyat. Salah satu komponen fundamental demokrasi adalah kebebasan berpendapat, beragama, bersekutu, dan berorganisasi, yang menjamin setiap warga negara dengan hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Dalam sistem demokrasi yang kuat, pemerintah harus beroperasi secara transparan dan terbuka. Ini membantu menghentikan praktik korupsi dan penggunaan kekuatan terhadap populasi umum. Peran demokrasi sipil adalah untuk mendorong partisipasi aktif sipil dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Insentif pertumbuhan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan sosial berkelanjutan, karena hak untuk memilih pemimpin berkualitas dan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan rakyat. Demokrasi kewarganegaraan memiliki dampak positif pada pemberdayaan pemerintah yang responsif, transparan, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan melibatkan warga negara dalam merumuskan kebijakan politik, demokrasi menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan meningkatkan kepentingan dan aspirasi masyarakat umum (Jung, 2022).

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia, terutama di Asia dan Eropa. Demokratisasi sangat menekankan kebebasan untuk bertindak, untuk mengekspresikan diri dalam ruang sosial masyarakat, termasuk untuk berkomunikasi, berpikir, dan

mengungkapkan pendapat. Sistem politik Eropa dan Asia berbeda dalam hal kesatuan dan kohesi (Wuttke et al., 2022). Negara ini memiliki pendekatan berbeda terhadap demokrasi, tetapi semuanya berakar pada konsep demokrasi modern, yang mengasumsikan bahwa orang memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi. Eropa telah menjadi lebih stabil dan lebih kuat, demokrasi di Asia sebagian besar masih dalam proses tumbuh dan stabil, dan memiliki keunggulan atas negara-negara Eropa. Di negara-negara seperti India, Malaysia, dan Tunisia, demokrasi telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk sistem, termasuk sistem pemerintahan yang berfungsi dengan baik. Ada masalah lain yang dihadapi negara-negara Asia, seperti tingkat pendidikan rendah, sistem hukum yang lemah, dan budaya politik yang lemah (Kokaj & Sinani, 2023).

Demokrasi dapat memengaruhi kebijakan publik melalui cabang legislatif, termasuk demokrasi partisipatif, liberal, sosial dan representatif. Demokrasi kebijakan publik di Eropa dan Asia dapat dipengaruhi oleh demokrasi representatif, dampaknya adalah sistem demokrasi-representatif, terdiri dari mayoritas wajar dan tidak wajar, partai politik yang masuk akal, pemerintahan yang diinformasikan, dan masyarakat yang responsive (Tresiana et al., 2023). Demokrasi yang terbentuk oleh pemerintahan yang lemah, pengawasan pemerintah, praktik korupsi, dan penyalahgunaan hukum yang berpotensi berbahaya, dapat memengaruhi opini publik tentang keamanan nasional dan nilai-nilai demokratis. Demokrasi yang mencakup akses keadilan sosial, pengurangan kemiskinan, kelompok sosial, dan perdamaian dapat memengaruhi kebijakan publik yang terkait dengan keadilan sosial nasional. Partisipasi masyarakat sipil, partisipasi pemilihan dan demokrasi langsung, dan pemilihan subnasional terdiri dari demokrasi partisipatif yang beragam, kesejahteraan warga dan ketahanan demokratis (Melgar et al., 2022). Dalam demokrasi langsung, orang-orang memiliki kesempatan untuk mengekspresikan aspirasi mereka tidak hanya dalam memilih perwakilan mereka tetapi juga dalam berpartisipasi dalam proses membentuk kebijakan publik. Politik juga dipengaruhi oleh demokrasi, seperti ditunjukkan oleh kontroversi data dalam kebijakan publik. Dengan penciptaan ruang demokrasi ini, kebijakan publik akan menjadi lebih inklusif, bertanggung jawab, dan fleksibel dalam menanggapi perubahan (Cortez, 2023).

Alemayehu, (2022) mengklaim bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan legitimasi sebuah negara demokratis adalah menghapus pengaruh kepentingan khusus dan membuatnya bertanggung jawab kepada rakyat sehingga pemerintah beroperasi dalam kepentingan, kebutuhan, dan kepentingan terbaik rakyat. Melalui pemilu lebih umum dan bersih, partai politik yang lebih bebas, dan bentuk pemerintahan yang lebih representatif, demokrasi mempengaruhi kebebasan

warga. Dengan memastikan bahwa orang-orang memiliki kebebasan untuk bermitra, protes, dan berkumpul seperti yang mereka anggap cocok, kebebasan berkumpul adalah refleksi dari demokrasi (Jaja & Aditya, 2022). Dasar demokrasi global adalah kebebasan berkumpul, mempertahankan hak orang dan komunitas untuk memilih struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya mereka sendiri dan bebas dari paksaan. Berikut adalah sifat-sifat kebebasan berkumpul: pertama, pluralisme politik, mengakui keberadaan pemegang hak yang berbeda, adalah prasyarat untuk demokrasi. Kedua, kebebasan dan hak politik. Ketiga, hak asasi manusia yang melindungi kebebasan berbicara, pendapat, dan agama. Keempat, kemampuan berkumpul untuk tujuan mengekspresikan kehendak dan protes secara bebas mempromosikan suasana menunjukkan sistem demokrasi berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, kebebasan sangat penting untuk melestarikan demokrasi karena berfungsi sebagai dasar mempertahankan hak individu dan mengatur perilaku dalam struktur sosial yang adil (Jatau & Maza, 2023).

Demokrasi memperkuat bentuk pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat, yang memiliki dampak pada keterlibatan publik di seluruh dunia. Memberikan warga negara kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dianggap sebagai salah satu nilai fundamental demokrasi (Colomer, 2023). Pemilu sangat penting karena warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin negara mereka dan membuat mereka bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan warga negara, partisipasi demokratis, dan kesejahteraan subjektif mereka (Liu et al., 2023). Sistem pemerintahan di Eropa, mencakup partai politik bebas, pemungutan suara inklusif, pemilihan transparan, dan kepemimpinan terpilih, memiliki dampak pada partisipasi masyarakat. Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dipengaruhi oleh demokrasi di Asia Tenggara. Partisipasi warga memberikan mereka kesempatan untuk mengekspresikan tujuan dan keinginan mereka, menjelaskan kepada para pemimpin yang bercita-cita apa yang diharapkan dari mereka. Dalam hal ini, demokrasi memungkinkan warga negara untuk lebih sepenuhnya terlibat dalam proses politik, yang pada akhirnya akan mengarah pada urutan politik yang lebih demokratis dan penting untuk menjamin stabilitas politik.

Demokrasi global sangat penting karena transformasi ICT dan partai politik, tetapi banyak negara kekurangan prinsip-prinsip demokratis, yang menyebabkan erosi dan autocracy. Memantau dan memperkuat proses pemilu sangat penting untuk membangun demokrasi yang sehat. Media sosial dapat memfasilitasi komunikasi, tetapi informasi yang salah dapat merusak kepercayaan diri. Singapura adalah contoh negara yang belum sepenuhnya merangkul demokrasi. Warga di negara-

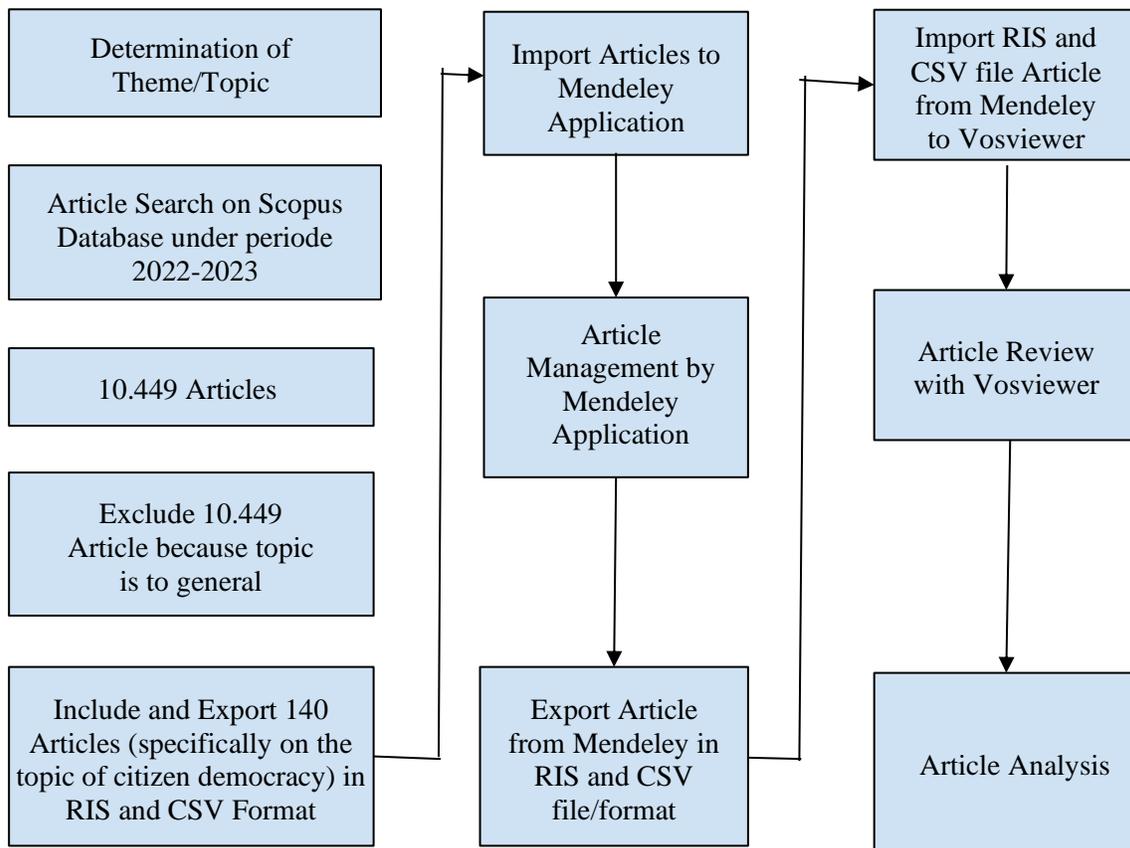
negara demokratis memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, melindungi hak-hak mereka, dan bertindak secara transparan. Demokrasi sipil mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi, sementara demokrasi kewarganegaraan memberdayakan pemerintah. Demokrasi mempengaruhi kebijakan publik melalui legislatif, termasuk demokrasi representatif, yang memengaruhi keamanan nasional dan keadilan sosial. Ini memperkuat bentuk pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat, sehingga mempengaruhi keterlibatan orang-orang di seluruh dunia.

METODE PENELITIAN

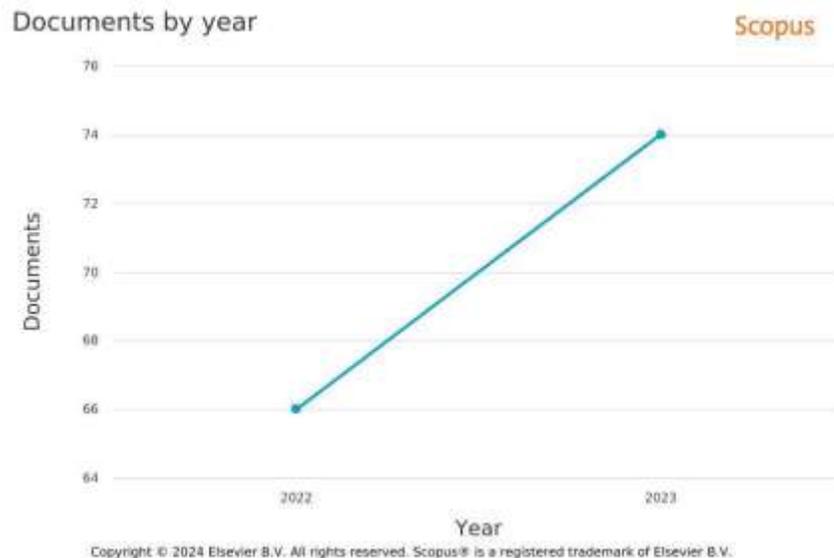
Studi ini meneliti berbagai artikel yang terkait erat dengan demokrasi warga negara. Artikel skala internasional dan reputasi adalah sumber utama referensi dalam persiapan studi ini. Fokus dari ulasan yang dibahas dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa faktor fundamental, dalam hal memahami konsep, dampak, dan pola yang terkait dengan demokrasi warga. Para peneliti mencoba untuk meringkas studi yang telah ditinjau oleh peneliti sebelumnya untuk menemukan benang umum dan memahami bagaimana demokrasi warga terjadi di era ini. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah review sistematis dari literatur menggunakan 140 artikel ilmiah yang berasal dari basis data scopus. Meninjau artikel menggunakan aplikasi Vosviewer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1. menunjukkan bahwa penelitian ini dimulai dengan pencarian artikel menggunakan kata kunci “demokrasi warga” di database scopus untuk periode 2022-2023. Pencarian ini mengidentifikasi 140 artikel dan kemudian ditinjau secara bertahap: mencari artikel, mengimpor artikel ke dalam perangkat lunak aplikasi, dan memetakan topik diskusi.

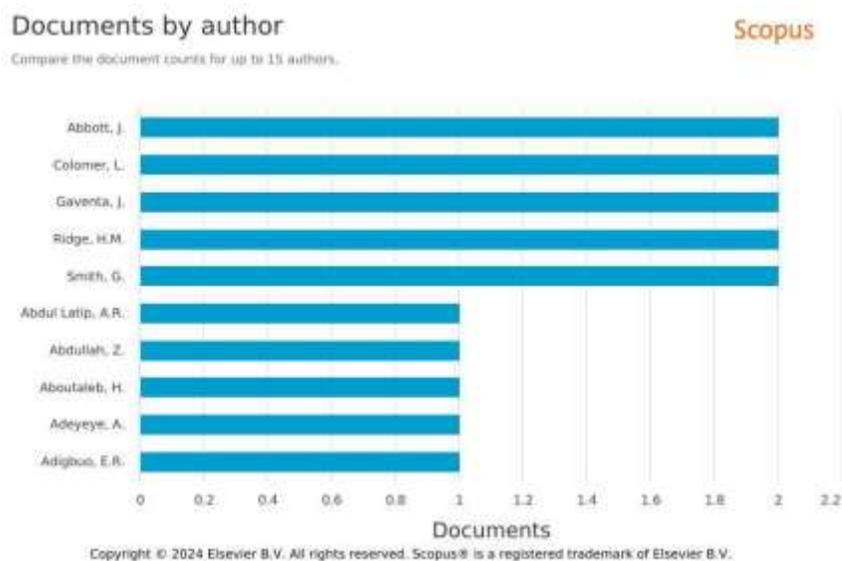


Beberapa artikel memiliki hubungan yang kuat diperoleh oleh para peneliti sesuai dengan prosedur berikut: Pertama, pengidentifikasi artikel mencoba untuk mengatur dan memilih berbagai artikel sehingga hanya terkait dengan topik yang digunakan. Ini dilakukan dengan memasukkan kata kunci "demokrasi warga" di kolom pencarian, dengan pembatasan dari 2022 hingga 2023. Berdasarkan proses pencarian, 10.449 artikel yang terkait dengan topik ini diperoleh. Tahap kedua melibatkan memeriksa berbagai artikel yang ditemukan untuk menentukan apakah mereka benar-benar dibutuhkan dan terkait erat dengan pemerintahan yang baik. Verifikasi dilakukan dengan membatasi area subjek (ilmu sosial), jenis dokumen (artikel), tahap publikasi akhir, dan bahasa Indonesia. Proses verifikasi mengidentifikasi 140 artikel / jurnal yang relevan dengan demokrasi sipil. Artikel ini digunakan sebagai referensi untuk mempelajari demokrasi warga negara.



Gambar 2. Tren Penelitian Berdasarkan Tahun Scopus Pada Konsep Demokrasi Warga Negara Di Beberapa Negara.

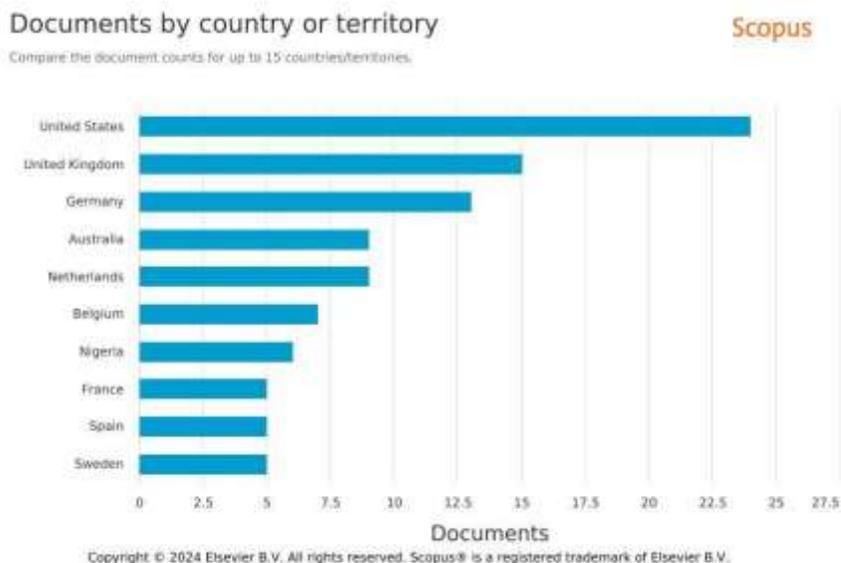
Gambar 2. Adalah analisis data penelitian yang dilakukan dari 2022 hingga 2023. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa tren penelitian yang dilakukan berkaitan dengan konsep demokrasi warga negara di beberapa negara mengalami kecenderungan kenaikan tren. Hal ini ditunjukkan dengan terus meningkatnya kuantitas pembahasan mengenai topik ini di tiap tahunnya.



Gambar 3. Penelitian tren berdasarkan penulis dari scopus tentang demokrasi sipil.

Gambar 3. Menunjukkan frekuensi penulis tentang demokrasi sipil. Pada topik demokrasi warga, dapat dilihat dari gambar bahwa Abbott, J adalah penulis yang paling sering menulis tentang

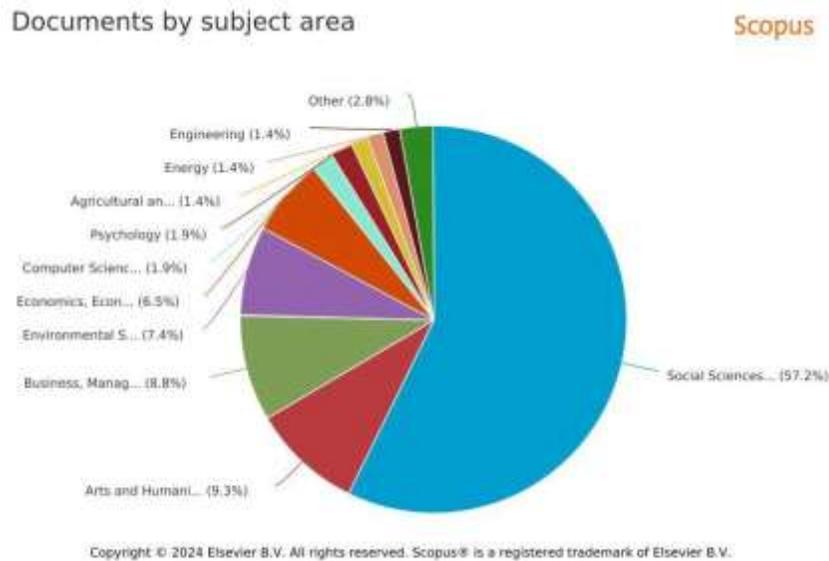
demokrasi sipil dengan total 2 artikel yang ditulis. Berikutnya di posisi keenam adalah Abdul Latip, A.R dengan 1 artikel. Pada topik demokrasi warga negara, penulis yang menulis tentang topik ini rata-rata memiliki intensitas sama dalam menulis.



Gambar 4. Penelitian tren berdasarkan beberapa negara dari scopus pada demokrasi warga.

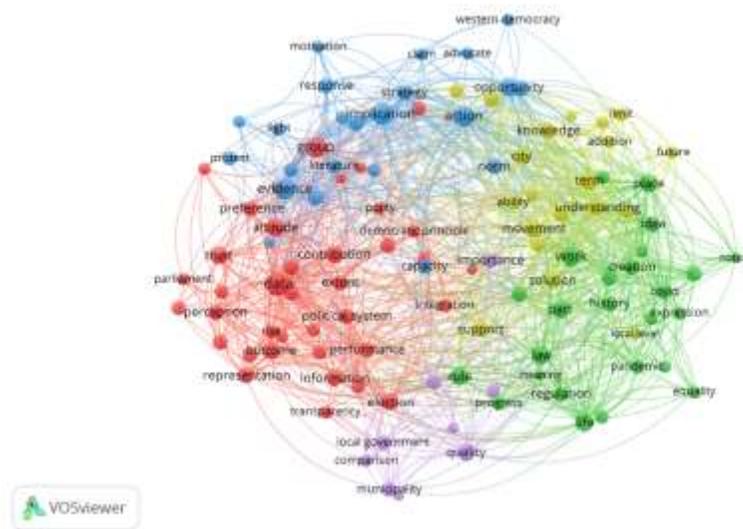
Gambar 4 menunjukkan intensitas negara dalam membahas demokrasi warga negara. Berdasarkan data ini, kita dapat melihat negara yang paling banyak membahas tentang topik demokrasi warga negara. Berdasarkan data yang ditampilkan dapat dilihat bahwa Amerika Serikat adalah negara tertinggi dalam membahas demokrasi warga negara dengan angka 23,7 dari 2022 hingga 2023. Kemudian diikuti oleh Inggris dengan angka 15 dan di tempat ketiga ada Jerman yang cukup sering membahas tentang demokrasi warga negara dengan angka 12,8. Berdasarkan data pada Gambar 4. Hal ini dapat diperhatikan bahwa jarak antara Amerika Serikat dan negara setelah itu tidak jauh berbeda dalam kaitannya dengan intensitas membahas topik ini. Di Amerika Serikat, demokrasi adalah topik yang paling dibahas dalam penelitian. Ada beberapa alasan mengapa bangsa Amerika begitu tertarik untuk mempelajari dan mendiskusikan demokrasi. Amerika Serikat dianggap sebagai salah satu negara dengan sistem demokrasi paling kuat dan paling berpengaruh di dunia. Sebagai demokrasi yang didasarkan pada kekuasaan atas suara rakyat, Amerika Serikat memiliki pengalaman dan wawasan berharga dalam mengembangkan dan membangun sistem demokratis. Perkembangan demokrasi tidak selalu stabil. Ada periode dimana sistem perbudakan berlangsung untuk waktu yang lama, perjuangan untuk hak-hak orang kulit hitam, pengakuan hak untuk memilih wanita baru, dan pengiktirafan hak warga minoritas didukung. Ini menunjukkan

bahwa demokrasi di Amerika Serikat tidak selalu bekerja dengan lancar dan sering menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Namun demikian, Amerika Serikat dianggap sebagai negara dengan kualitas demokrasi tertinggi di dunia.



Gambar 5. Tren Penelitian Didasarkan Pada Beberapa Subjek Area Dari Scopus Demokrasi Warga Negara.

Gambar 5. Data area subjek yang paling dibahas tentang demokrasi sipil adalah ilmu sosial dengan 57,2%, diikuti oleh seni dan humaniora dengan 9,3%. Berdasarkan data di atas, ilmu sosial lebih banyak digunakan untuk menganalisis masalah hukum, politik, dan pendidikan serta untuk memodifikasi dan menerapkan hukum yang lebih efektif dan demokratis. Selain itu, ilmu sosial membantu mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip-prinsip demokrasi, yang merupakan aspek penting dari proses pemilihan dan pengembangan demokrasi.



Gambar 6. Klasifikasi topik diskusi yang berkaitan dengan demokrasi warga negara.

Gambar 6. Menunjukkan bagaimana tema-tema ini dikelompokkan, dan kelompok-kelompok ini diatur untuk direview yang memiliki korelasi berdasarkan tema yang dibahas. Tabel 1 memetakan konsep atau tema berdasarkan cluster yang terkait dengan studi demokrasi warga negara.

Tabel 1. Tema Yang Dikelompokkan Dalam Cluster

Cluster	Konsep	Total
Cluster 1	Sikap, kepedulian, kontribusi, korupsi, data, institusi demokratis, prinsip demokrasi, sistem demokrasi, perbedaan, efektivitas, efisiensi, pemilihan, skala, kegagalan, pemerintahan yang baik, kelompok, informasi, integrasi, hasil, parlemen, demokrasi partisipatif, persepsi, kinerja, lembaga politik, partai politik, sistem politik, politisi, populisme, preferensi, alasan, representasi, demokratis perwakilan, responsif, kenaikan, transparansi, tren, kepercayaan.	37
Cluster 2	Konstitusi, covid, penciptaan, kesetaraan, ekspresi, kebebasan, sejarah, ide, hukum, demo, kehidupan, manajemen, makna, gagasan, angka, pandemi, bagian, periode, tempat, proses politik, populasi, kemajuan, regulasi, peraturan, pekerjaan.	26
Cluster 3	Tindakan, pembela, kapasitas, keterlibatan warga, klaim, konsekuensi, pendidikan, bukti, penelitian masa depan, implikasi,	22

	hidup, literatur, motivasi, norma, peluang, partisipasi politik, protes, wilayah, tanggapan, sarjana, strategi, demokrasi barat.	
Cluster 4	Kemampuan, penambahan, kecerdasan buatan, perhatian, bawah, pengalaman, ahli, masa depan, individu, pengetahuan, batas, tingkat lokal, gerakan, kemungkinan, publik, solusi, dukungan, istilah, pemahaman.	19
Cluster 5	Perbandingan, dimensi, kepentingan, pemerintah daerah, penganggaran, partisipatif, kualitas, situasi.	8

Tabel ini menunjukkan bahwa cluster 1 terutama membahas bagaimana sistem demokrasi digunakan di berbagai negara di dunia sebagai dukungan dalam demokrasi warga. Dalam cluster 1, kata kunci yang paling dominan adalah sistem demokrasi. Ini menunjukkan bahwa topik-topik demokrasi memiliki frekuensi tertinggi, atau sering disebutkan, di cluster 1. Ini karena semua konsep yang ditulis oleh penulis selalu merujuk pada demokrasi.

Cluster 2, kata kunci yang paling dominan adalah kebebasan karena semua konsep yang ditulis oleh penulis selalu merujuk pada subjek kebebasannya, semakin tinggi tingkat demokrasi sipil, semakin besar kemerdekaan yang dimiliki warga dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, banyak penulis meneliti topik ini.

Cluster 3, menampilkan partisipasi politik yang dominan dalam demokrasi sipil, di mana tingkat tinggi demokratis sipil cenderung dikaitkan dengan peningkatan keterlibatan politik. Oleh karena itu, kata kunci dominan adalah partisipan, yang berarti semua penulis merujuk padanya di cluster 3.

Cluster 4, representasi dominan dari masyarakat atau komunitas, di mana komunitas adalah pemain utama dalam melakukan demokrasi. Oleh karena itu, penulis menyebutkannya di cluster 4. Cluster 5, diskusi yang dominan tentang perbandingan dalam demokrasi warga. Di mana demokrasi di negara-negara yang berbeda bervariasi, oleh karena itu, penulis mengacu pada itu di cluster 5.

diperlukan untuk memberikan referensi pada konsep yang sering dibahas. Oleh karena itu, hasil dari data yang diproses ditunjukkan dalam gambar 8.

Pada penelitian sebelumnya beberapa ahli menggambarkan demokrasi warga berfokus pada perwakilan masyarakat yang membebani sistem politik atau menghancurkan pandangan kolektif tentang politik (Lim & Yigitcanlar, 2022). Sisi lain melihat kebijakan kontroversial memberi warga metode tambahan dan lebih efektif untuk memengaruhi pembuat kebijakan. Demokrasi perwakilan warga negara partai tidak berfungsi karena kelemahan struktural seperti "ketidakmampuan untuk representasi dalam kelompok", "asimetri informasi", "pemecahan statis oleh partai politik" dan "polisentrisme administratif yang tidak terkoordinasi" (Karagulyan & Batyreva, 2023). Di satu sisi, beberapa ahli melihat warga lebih percaya diri sebagai beban bagi sistem politik, atau berpotensi mengganggu pandangan kolektif tentang politik. Dalam perspektif ini, peningkatan keterlibatan publik dilihat sebagai meningkatnya tekanan pada sistem politik, yang berpotensi menyebabkan ketidakstabilan atau kekacauan politik. Ada kekhawatiran bahwa warga negara yang kuat, didorong oleh kepentingan dan keyakinan mereka sendiri, dapat berkontribusi pada polarisasi politik dan membuat sulit untuk merumuskan kebijakan berdasarkan konsensus. Pandangan ini berpendapat keterlibatan warga adalah dasar demokrasi, sikap warga yang terlalu kuat dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam sistem demokratis. Disisi lain, ada para ahli yang melihat kebijakan kontroversial menyediakan metode tambahan dan lebih efektif bagi masyarakat untuk memengaruhi pembuat kebijakan. Perspektif ini, sering dikaitkan dengan model demokrasi deliberatif dan partisipatif, berpendapat bahwa keterlibatan warga, bahkan dalam isu-isu yang memisahkan, akan memperkaya proses demokratis. Ini menyatakan bahwa ketika orang memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, yang dapat menghasilkan hasil yang lebih inklusif dan responsif. Dari sudut pandang ini, alih-alih campur tangan dalam sistem politik, warga negara yang kuat dapat memperkuat proses demokrasi dengan memastikan bahwa suara dan kepentingan yang berbeda didengar dan diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan.

Penelitian terbaru tentang demokrasi menekankan keragaman pendekatan yang diambil oleh negara-negara berbeda dalam mencapai pemerintahan demokratis, tetapi semuanya pada dasarnya berakar pada prinsip-prinsip demokrasi modern. Konsep ini mengasumsikan bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi mereka, yang merupakan hak yang melekat dalam masyarakat demokratis (Wuttke et al., 2022). Eropa, dengan lembaga-lembaga demokrasi yang stabil dan kuat, adalah pilar demokrasi yang sudah mapan. Sistem demokrasi di benua ini

telah matang melalui perkembangan dan kesempurnaan selama berabad-abad, mencerminkan tingkat stabilitas politik dan kekuatan institusi yang tinggi. Namun, penting untuk mengakui dinamika demokrasi berkembang di bagian lain dunia, di Asia (Kokaj & Sinani, 2023). Meskipun demokrasi Asia sebagian besar dalam proses pertumbuhan dan stabilisasi, demokratis Asia memiliki keunggulan mereka sendiri atas negara-negara Eropa. Negara-negara seperti India, Malaysia dan Tunisia telah membuat kemajuan signifikan di jalan menuju demokrasi, menerapkan berbagai bentuk sistem demokratis, termasuk struktur pemerintah yang berfungsi dengan baik. Pertumbuhan demokrasi di negara-negara ini menyoroti kemampuan untuk menyesuaikan prinsip-prinsip demokrasi dengan berbagai konteks budaya, sosial dan politik. Namun, jalan menuju demokrasi di sebagian besar negara-negara Asia memiliki tantangan. Masalah seperti tingkat pendidikan rendah, kelemahan dalam sistem hukum dan kerentanan budaya politik sering menjadi hambatan bagi konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu, kemajuan demokrasi yang dibuat oleh negara-negara ini, penting untuk mempertimbangkan tantangan ini dalam penilaian kita tentang perkembangan demokrasi di Asia.

Studi ini telah menunjukkan bahwa demokrasi politik selalu tunduk pada lebih banyak risiko. Kedua studi sebelumnya dan saat ini menunjukkan bahwa kebebasan, kesetaraan dan kedaulatan hukum, secara paradoks, adalah pilar demokrasi menunjukkan kemungkinan bencana. Misalnya, meskipun kebebasan berpendapat adalah dasar dari masyarakat demokratis, itu dapat disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda atau informasi palsu, melemahkan demokrasi itu sendiri. Demikian pula, ketidaksetaraan, menjamin semua warga hak suara yang sama dalam pemerintahan, dapat menyebabkan tirani mayoritas, yang mengabaikan hak dan kepentingan minoritas. Yang telah ditemukan dalam penelitian saat ini dan sebelumnya hampir sama. Ini menunjukkan bahwa masalah dasar masyarakat demokratis tetap sama, terlepas dari perkembangan dan modernisasi mereka. Demokrasi rentan terhadap penyalahgunaan karena keterbukaan, memungkinkan keragaman pendapat dan partisipasi. Dikotomi ini adalah subjek penelitian berbeda yang telah dilakukan selama periode waktu yang berbeda. Perbandingan antara penelitian sebelumnya dan saat ini menunjukkan bahwa kerentanan kebijakan demokratis memiliki masalah yang sama, meskipun kebijakan demokrasi terus berevolusi. Kesamaan ini menunjukkan bahwa solusi untuk tantangan ini tidak hanya berfokus pada mengurangi ancaman yang ada, tetapi juga untuk mengatasi kelemahan sistem demokratis. Pembuat kebijakan dan ilmuwan harus memahami hambatan konstan ini dan bekerja untuk membangun kerangka kerja yang lebih kuat dan lebih inklusif untuk demokrasi.

KESIMPULAN

Studi yang berkaitan dengan demokrasi warga negara penting dan perlu disajikan secara luas. Perkembangan demokrasi di berbagai negara di dunia telah membawa perubahan dan dinamika pada pola demokrasi warga negara. Penelitian ini mengungkapkan beberapa penelitian dominan terkait dengan demokrasi warga negara. Beberapa aspek yang paling penting dari demokrasi warga negara adalah sebagai berikut: pertama, demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan memainkan peran penting dalam memahami demokrasi dan dasar-dasar mereka.

Prinsip kebebasan menekankan pentingnya hak asasi manusia, termasuk kebebasannya berbicara, pendapat, agama, dan organisasi. Aspek kedua dari implikasi integrasi dalam kehidupan masyarakat berarti bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Integritas sosial dan politik yang kuat dapat mengurangi konflik, mendorong toleransi, dan menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk kerjasama dan koeksistensi harmonis. Oleh karena itu, implikasi integrasi kehidupan masyarakat sangat penting dalam demokrasi warga negara. Selanjutnya, aspek penting lainnya adalah konsep demokrasi barat. Dalam studi ini demokrasi Barat membangun dan memperkuat sistem demokrasi yang inklusif, terlibat, dan adil. Namun, harus diingat bahwa gagasan demokrasi selalu berubah dan dapat bervariasi di setiap negara. Penting bagi setiap negara untuk mengadopsi gagasan dasar demokrasi yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini telah berkontribusi untuk menunjukkan perkembangan demokrasi warga negara di tingkat global dan memberikan kontribusi signifikan untuk penelitian lebih lanjut. Melalui penelitian ini, kita dapat memahami peran penting yang dimainkan warga sipil dalam mempengaruhi proses demokrasi dan meningkatkan sistem politik. Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan berharga bagi para peneliti masa depan untuk mengembangkan teori dan praktik demokrasi sipil yang lebih baik. Pembatasan penelitian ini adalah bahwa artikel hanya digunakan dari basis data skopus sehingga temuan penelitian tidak dapat secara komprehensif menggambarkan isu-isu demokrasi warga. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut perlu menggunakan artikel ilmiah yang berasal dari kumpulan data internasional terkemuka lainnya, seperti Web of Science and Dimensions Scholars sebagai sumber jurnal internasional yang sangat menonjol dan memperpanjang periode waktu ke sumber penelitian yang diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alemayehu, D. (2022). Challenges to The Assumption That Economic Success Could Enhance State Legitimacy in Africa, Ten Years Later. *Development (Basingstoke)*, 65(2–4), 161–177. <https://doi.org/10.1057/s41301-022-00348-x>
- Colomer, L. (2023). Participation and cultural heritage management in Norway. Who, when, and how people participate. *International Journal of Cultural Policy*. <https://doi.org/10.1080/10286632.2023.2265940>
- Cortez, F. (2023). Artificial Intelligence, Climate Change and Innovative Democratic Governance. *European Journal of Risk Regulation*, 14(3), 484–503. <https://doi.org/10.1017/err.2023.60>
- Dalton, R. J. (2022). Political Action, Protest, and the Functioning of Democratic Governance. *American Behavioral Scientist*, 66(4), 533–550. <https://doi.org/10.1177/00027642211021624>
- Dumitru, A. C., Losada-Puente, L., Peralbo, M., Brenlla, J. C., Rebollo-Quintela, N., & García-Fernández, M. (2023). Mapping energy citizenship in the south of Europe. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1112457>
- Frimpong, A. N. K., Ping, L., Adu-Gyamfi, S., & Amoah, M. (2022). Sustainable governance: social media and voter realignment, the case of Ghana. *International Journal of Technology, Policy and Management*, 22(3), 217–246. <https://doi.org/10.1504/ijtpm.2022.125256>
- Gouache, C. (2022). Imagining the future with citizens: participatory foresight and democratic policy design in Marcoussis, France. *Policy Design and Practice*, 5(1), 66–85. <https://doi.org/10.1080/25741292.2021.1930687>
- Iheanacho, V. U. (2022). The Catholic Church and Prophetic Mission: Transitioning Church-State Relations in Africa. *Religions*, 13(4). <https://doi.org/10.3390/rel13040339>
- Jaja, T. C., & Aditya, Z. F. (2022). PROMOTING THE GOOD GOVERNANCE BY ADVANCING THE ROLE OF PARLIAMENTARIANS AND THE TERM OFFICES LIMITATION (COMPARING NIGERIA AND INDONESIA). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(1), 265–298. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.54776>
- Jatau, V., & Maza, K. D. (2023). Democracy, Peace, and Religion in Nigeria: Can Religion Be Used to Consolidate or Undermine Democracy and Peace? *Religions*, 14(10). <https://doi.org/10.3390/rel14101305>
- Jung, S.-M. (2022). Participatory budgeting and government efficiency: evidence from municipal governments in South Korea. *International Review of Administrative Sciences*, 88(4), 1105–1123. <https://doi.org/10.1177/0020852321991208>
- Karagulyan, E., & Batyрева, M. (2023). A STUDY OF THE AVAILABILITY AND DEMAND OF DIGITAL SERVICES FOR THE MANIFESTATION OF SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITY BY CITIZENS. *BRICS Law Journal*, 10(4), 162–185. <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2023-10-4-162-185>
- Kokaj, A., & Sinani, B. (2023). The multi-level governance of the European Union: the role of the local government. *Juridical Tribune*, 13(1), 32–42. <https://doi.org/10.24818/TBJ/2023/13/1.03>
- Krawatzek, F., & Langbein, J. (2022). Attitudes towards democracy and the market in Belarus: what has changed and why it matters. *Post-Soviet Affairs*, 38(1–2), 107–124. <https://doi.org/10.1080/1060586X.2022.2029034>
- Kud, A. (2023). Decentralized Information Platforms in Public Governance: Reconstruction of the Modern Democracy or Comfort Blinding? *International Journal of Public*

- Administration*, 46(3), 195–221. <https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1993905>
- Lim, S. B., & Yigitcanlar, T. (2022). Participatory Governance of Smart Cities: Insights from e-Participation of Putrajaya and Petaling Jaya, Malaysia. *Smart Cities*, 5(1), 71–89. <https://doi.org/10.3390/smartcities5010005>
- Lippert-Rasmussen, K. (2023). Vote markets, democracy and relational egalitarianism. *Economics and Philosophy*, 39(3), 373–394. <https://doi.org/10.1017/S0266267122000220>
- Liu, Y., Wang, L., & Ye, M. (2023). Public participation in democracy, local accountability and happiness: Evidence from rural China. *Governance*, 36(4), 1225–1245. <https://doi.org/10.1111/gove.12738>
- Melgar, F. C., Herrera, A. L. R., Castro, E. A. G., Vargas, M. I. R., & Umaña, M. R. (2022). Participation and governance in the urban planning of Acapulco. *Regions and Cohesion*, 12(3), 110–133. <https://doi.org/10.3167/reco.2022.120306>
- Osterberg-Kaufmann, N., & Teo, K. K. (2022). Uncoupling Conceptual Understandings and Political Preferences: A Study of Democratic Attitudes among Singapore’s Highly Educated Young People. *Pacific Affairs*, 95(3), 497–526. <https://doi.org/10.5509/2022953497>
- Pungas, L. (2023). Dachas and food democracy—What makes a (good) food citizen? *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 7. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1052298>
- Qin, Y. (2023). Grassroots governance and social development: theoretical and comparative legal aspects. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01830-8>
- Stratu-Strelet, D., Gil-Gómez, H., Oltra-Badenes, R., & Guerola-Navarro, V. (2023). Exploring the links between democracy and digital transformation in developing Latin America countries: Building a democracy consolidation theory. *Technological Forecasting and Social Change*, 195. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122742>
- Tresiana, N., Duadji, N., & Damayantie, A. (2023). Deliberative Democracy Innovations at Citizen Level: Challenges of Local Government in Indonesia. *Lex Localis*, 21(4), 807–832. [https://doi.org/10.4335/21.4.807-832\(2023\)](https://doi.org/10.4335/21.4.807-832(2023))
- Wuttke, A., Gavras, K., & Schoen, H. (2022). Have Europeans Grown Tired of Democracy? New Evidence from Eighteen Consolidated Democracies, 1981-2018. *British Journal of Political Science*, 52(1), 416–428. <https://doi.org/10.1017/S0007123420000149>
- Zimbalist, Z. (2022). How electoral competition shapes local public goods provision in South Africa. *Democratization*, 29(2), 253–275. <https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1952991>